

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 64-65.
- Adnan Buyung Nasition dkk., *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000.
- , *Demokrasi Konstitusional*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin, dan Herdi Sahrasad, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Press, Jakarta, 2000.
- Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Aloysius Soni BL de Rosari, “*Monarki Yogya*” *Inkonstitusional?*, Kompas, Jakarta, 2011.
- Baharuddin Lopa, *Al Qur’an dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Karawang, 1993.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hege, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gemta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bhenyamin Hoessein, “*Otonomi Daerah: Review Implementasi dan Prospek Ke Depan*”, makalah yang disampaikan dalam “*Temu Refleksi Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2003 dan Proyeksi Tahun 2004*”, yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam negeri tanggal 15 Januari di Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri Jakarta, 2004.

- Bonar Simorangkir et al., *Otonomi atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan, Jakarta, 2000.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- C. F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996.
- C. W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983.
- Djauhari, *Konsep Negara Hukum Konstitus, Demokrasi dan Kedaulatan*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2011.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007.
- Edi Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1966.
- Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Hendry B. Mayo, *An Intruduction to Democratic Theory*, Oxford Univercity Press, Oxford, New York, 1960.
- I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Alumni, Bandung, 2008.
- James A. Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbngan antara individualime dan kolektivitisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik*

dan Demokrasi ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.

_____, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, tidak diterbitkan, Denpasar, 2003.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975.

Jhon Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Alex Lanur, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Kacung Marijan, *Sistem Politik di Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007.

Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.

Moch. Nurhasim & Ikrar Nusa Bakti, *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), Yogyakarta, 2009.

M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1983.

M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Djakarta, 1952.

_____, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____ , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- _____ , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- _____ , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- MPR RI, *Panduan dalam memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI Jakarta, 2003.
- M. Nasroen, *Masalah Sekitar Otonomi*, J.B. Wolters, Jakarta, 1951.
- Naskah Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alaman VIII, 5 September 1945.
- Naskah Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____ , *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____ , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- _____ , *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- _____ , *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014.

- Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu politik*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume I, 2004.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.
- Samuel P. Huntington, *gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- Safroedin Bahar et. al., ed., *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.
- Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Siswanto Sisnarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PREES, Jakarta, 1985.
- Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigm Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Wendi Melfa, *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*, BE Press, Lampung, 2013.

Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta, 2013.

Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Internet :

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/191795-sby--pernyataan-saya-soal-monarki-digeser>. Diakses pada tanggal 20 November 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Neolophonotus_floccus. Diakses tanggal 20 November 2014.

<http://kwikkiangie.com/v1/2014/09/kontroversi-tentang-pilkada/>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2015.

<http://www.kemendagri.go.id/news/2014/09/26/dpr-akhirnya-memilih-pilkada-melalui-dprd>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2015.